

Pasca reformasi politik (1998) bangsa Indonesia seperti tidak memiliki jati diri. Berbagai persoalan yang melanda bangsa ini seolah juga tidak memiliki pedoman untuk dijadikan sebagai referensi penyelesaian. Di tengah arus globalisasi, bangsa Indonesia juga seperti tidak memiliki ideologi yang berfungsi mempersatukan dan memberikan arah gerakan usaha bersama bangsa. Sejumlah nilai-nilai dasar dipertanyakan, diabaikan dan atau diganti dengan nilai-nilai baru. Kalau semula menampakkan nilai-nilai yang tak selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa dipandang sebagai penyimpangan, kini semakin banyak nilai-nilai yang tidak selaras dengan nilai-nilai dan norma kehidupan masyarakat kita justru ditampilkan dengan penuh kebanggaan.

Lebih dari itu, kecenderungan bersikap dan berperilaku pragmatik serta keterpesonaan terhadap wacana ideologi-ideologi dunia nyaris menenggelamkan bahkan menghilangkan jati diri kita. Kini rasa keindonesiaan pun juga terasa memudar. Padahal, harus disadari bahwa memudarnya rasa keindonesiaan tersebut bisa menjadi awal kepunahan kita sebagai bangsa. Tulisan ini membahas permasalahan keindonesiaan tersebut dikaitkan dengan persoalan kebahasaan (Indonesia).

Salah satu kata kunci yang niscaya hadir dalam setiap perbincangan tentang bahasa, khususnya Bahasa Indonesia, adalah jati diri bangsa dan persatuan nasional. Bahasa memang acapkali berkaitan erat dengan bangsa. Ini seperti bunyi pepatah lama: "*Yang kurik kundi, yang merah saga; yang baik budi, yang indah bahasa*". Keberbudian seseorang atau suatu masyarakat, sebagaimana tampak dalam pantun ini, dalam batas tertentu dapat ditakar melalui keindahan dan kesantunan berbahasa. Atau pepatah "Bahasa menunjukkan bangsa" tampaknya juga masih relevan untuk mengawali diskusi ini.

Para pelajar linguistik, dan seharusnya pula para pengajar mereka, niscaya mengetahui betapa hubungan bahasa dan penggunaannya telah diperdebatkan cukup lama. Tak seperti dugaan para pelajar psikologi, misalnya, bukan manusia yang menentukan bahasa, tetapi justru bahasa yang membentuk cara pandang manusianya. Sebagai contoh, bahasa dan politik bergandeng erat. Pada masa prakemerdekaan, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang majemuk berhasil memupuk rasa sebangsa untuk mengusir penjajah. Setelah bahasa membentuk dunia pikiran dan perasaan setanah air, rakyat Indonesia bergerak dari kategori etnik ke kategori bangsa.

Di lain pihak, bahasa bisa dikias sebagai "penjara" bagi penggunaannya, karena pada dasarnya manusia berpikir, mengelola buah pikiran, dan mengungkapkan hasil pemikiran, dengan piranti

MENJADI INDONESIA DENGAN BUDAYA (BAHASA) SENDIRI

Written by Mudjia Rahardjo

Saturday, 27 February 2010 00:02 -

bahasa. Misalnya, mungkinkah kita mengungkapkan kemarahan membabi-butakan padahal kita sedang berbahasa *Jawa kromo inggil*? Contoh yang lain, misalnya, agak sulit bagi bangsa ini --- yang miskin sekali akan tambo demokrasi --- untuk memahami apalagi melaksanakan kaidah dan tata kerja demokrasi. Oleh karena itu, wajar jika praktik demokrasi di Indonesia yang menggema sejak kejatuhan Orde Baru berjalan tersendat-sendat. Bahkan menurut Nurholis Madjid (almarhum), dalam keadaan normal praktik demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia baru dapat terlaksana setelah masa 20 (dua puluh tahun) dari sekarang.

Ketika Sigmund Freud memperkenalkan psikoanalisis, dan berteori bahwa penentu otonomi manusia bukan kesadarannya, tetapi justru ketidaksadarannya, maka manusia pun digugat-balik, bukan lagi sebagai pelaku otonom. Subjektivitas dalam diri manusia sebagai agensi dikritisi justru karena manusia tidak sepenuhnya otonom, lantaran sebagian dirinya ditentukan oleh super ego berupa tradisi baik buruk; norma salah benar yang ditanamkan dan dikonstruksikan sebelum kesadarannya tumbuh dewasa. Sebagian lain ditentukan serta dikonstruksi oleh libido naluriah demi kelangsungan hidup. Berkat pemikir ini, semakin disadari pembentukan proses menjadi diri seseorang ternyata bukan melulu individu sebagai pemakna hidup, tetapi dibentuk oleh struktur kepribadian yang tidak otonom lagi.

Pun ketika Friedrich Nietzsche mengajukan buah pikirannya tentang hubungan manusia dengan bahasa; wacana dan ideologi; diri subjek disadari baru sebagai hasil bentukan bahasa dan wacana lebih daripada pencipta bahasa. Singkat kalimat, ketika manusia lahir, ia sudah dikondisikan dan dibentuk oleh tradisi atau bahasa ibu untuk mempelajarinya agar mengada, hadir, tampil dan bisa berwacana.

Bagaimana bila bentukan bahasa ini merupakan bahasa penindas? Bagaimana pula bila pikiran penindas yang menempatkan kaum terjajah selalu sebagai budak? Kesimpulannya, seperti diteorikan oleh Paulo Freire, terjadi internalisasi nilai-nilai penindas. Cita-cita tertinggi kaum tertindas, sadar atau tidak sadar, adalah menjadi sang maha penindas. Karena itu, jangan heran kalau citra kecantikan manusia terjajah adalah berkulit putih, berwajah indo, berambut pirang, dan mungkin pula bersuara *cade!* ketika berbahasa Indonesia. Gejala ini yang oleh Martin Carnoy diistilahkan sebagai penjajahan budaya (*cultural imperialism*). Belakangan, pokok-pokok pertanyaan tajam ini menjadi kawasan kajian pasca-kolonialisme.

Ada beberapa sebab utama mengapa otonomi diri individu rasional bisa diruntuhkan oleh peran bahasa dan sistem tanda dan makna yang mengkonstruksi diri manusia.

MENJADI INDONESIA DENGAN BUDAYA (BAHASA) SENDIRI

Written by Mudjia Rahardjo

Saturday, 27 February 2010 00:02 -

Pertama, pemikiran strukturalisme Louis Althusser. Menurutnya, konstruksi diri manusia dibentuk oleh bangunan ideologi sebagai sistem makna yang menerangkan kenyataan dan membuat kenyataan "bisa" dipahami. Dia menunjukkan bahwa pemberi dan penentu makna yang mengajari masyarakat untuk berelasi sosial adalah kelas penguasa yang memiliki kekuasaan hegemoni tafsir makna dan tafsir hubungan antar anggota. Tafsir hegemoni ini disemburkan dalam anggota masyarakat lewat media massa, saluran penerangan hingga menjadi kesadaran masyarakat yang ideologis semu palsu.

Mengapa? Masyarakat mengira itu adalah kesadarannya, padahal sebenarnya kesadaran palsu hasil manipulasi ideologis kelas pemilik tafsiran dan hegemoni arti. Kesadaran palsu ideologis ini dilanggengkan lewat lembaga-lembaga pendidikan, birokrasi, aparat keamanan, propaganda media massa yang membentuk terus menerus kesadaran warga hingga sama dengan kesadaran penguasa pemilik tafsir makna. Ini sebabnya kesadaran seolah-olah demokratis padahal semu dan palsu. Kesadaran palsu ini bisa langgeng karena pusat pikiran alternatif dalam mengkonstruksi sendiri makna juga berhasil dibungkam, atau sekurang-kurangnya diredam.

Kedua, pengembangan psikoanalisis Sigmund Freud yang menegaskan ketidaksadaran sebagai salah satu penentu diri manusia. Dalam penerapan, ini dipadukan dengan analisis struktural bahasa Ferdinand de Saussure. Sekreatif apa pun, manusia sebagai "diri" merupakan pencipta makna dalam bahasa atau karya seni. Manusia tidak hanya subjek perajut makna kata dan makna estetika, tetapi pada saat bersamaan, distrukturkan oleh sistem tanda atau kode bahasa yang ada. Artinya, manusia dikonstruksi oleh kode bahasa dan ia harus patuh mengikuti kode tanda ini bila mau berkomunikasi dalam wacana dengan sesamanya.

Dengan kata lain, diri manusia dihadapkan pada kode-kode bahasa yang merupakan konsensus-konsensus dan konvensi bersama masyarakat pengguna bahasa mengenai makna kata, nuansa bahasa yang dalam sistem tanda dirumuskan menjadi semiotika. Kemudian, dalam perkembangan wacana yang dinamis, kode tanda bahasa yang diaksarakan dan menjadi simbol-simbol yang lebih luas dari cakupan bahasa sementara ini disepakati sebagai teks. Di sinilah letak pentingnya memahami dan menangkap kode bahasa dan artinya dari teks melalui dialog-dialog bukan hirarkis atau dikotomis dua posisi (oposisi biner) tetapi antar teks (intertextuality).

Untuk memahami kode bahasa dalam menangkap makna teks itu, ilmu menafsirkan teks yaitu hermeneutika diluaskan dari teks eksegesis (menafsir teks-teks kitab suci) menjadi hermeneutika tekstual antar teks berkat jasa Dilthey dan tokoh Gadamer---yang berutang budi pada Martin Heidegger lantaran bahasa eksistensi meng-ada manusia sebagai Dasein dalam

MENJADI INDONESIA DENGAN BUDAYA (BAHASA) SENDIRI

Written by Mudjia Rahardjo

Saturday, 27 February 2010 00:02 -

ruang dan waktu harus diperbarui agar manusia menjadi sang pendengar Sabda dan sang pencipta bahasa.

Hermeneutika teks dalam konteks diri manusia dengan relasi sosialnya, dan dalam relasi berbahasa dan berelasi sistem tanda itulah dirumuskan “siapa aku atau diri ini dan siapa diri yang lain atau ‘the other’ (alterity) itu”?

Bila tafsirannya “terlalu menyempit” pada identitas diri secara relasi politis yang muncul hanyalah keramaian wacana-wacana politik identitas dalam pidator retorik tanpa studi penafsiran-penafsiran teks yang mendalam apalagi antar teks.

Namun, kode bahasa yang digunakan secara kreatif untuk bersastra tekstual tertulis bisa amat memperjuangkan pemuliaan diri manusia merdeka, egaliter Indonesia melawan seluruh konstruksi-konstruksi kultur yang menjajah, feodal dan memperbudak. Contoh paling dahsyatnya adalah bahasa Indonesia sastrawi yang dengan amat canggih diolah, dieksplorasi oleh Pramodya Ananta Toer dalam teks novel-novel kaliber dunia terutama tetralogi Pulau Buru-nya.

Ekspresi kreatif kode bahasa dan konvensi egaliter bahasa Indonesia Pram secara tajam dan dahsyat mengungkapkan perlawanannya terhadap strategi dan feodal serta paternalistiknya budaya Jawa yang memperbudak Nusantara ditambah hunjaman kolonialisme sampai menjadi bangsa yang kerdil. Justru bahasa Indonesia Pramodya secara tajam mengungkapkan kemampuannya untuk memakai medium sastra atau teks sastra sebagai perlawanan terhadap kultur (baca: konstruksi kultur) yang menindas agar kemerdekaan diri dan kemerdekaan bangsalah yang dimenangkan.

Sumber ketiga yang menentukan perumusan diri manusia sebagai bentukan (konstruksi) sistem pengetahuan dan sistem budaya pada konteks (kondisi) historis sudah dimulai dari wacana (diskursus) yang dipelopori oleh tulisan-tulisan penting Michel Foucault.

Sama seperti yang terjadi dalam kode bahasa yang membentuk siapa diri manusia, Foucault meneliti dalam arkeologi pengetahuan bahwa subjektivitas diri dikonstruksi oleh aturan main sistem pengetahuan yang sudah mulai dengan wacana. Manusia bukan pencipta makna atau arti bahasa dalam wacana. Tetapi keberadaannya distruktur oleh sistem pengetahuan tertentu

MENJADI INDONESIA DENGAN BUDAYA (BAHASA) SENDIRI

Written by Mudjia Rahardjo

Saturday, 27 February 2010 00:02 -

yang terungkap dalam wacana. Diri manusia dikonstruksi oleh relasi kekuasaan dalam wacana sejak pemegang tafsir wacana menentukan ia gila atau sehat dalam masyarakatnya. Sistem pengetahuan mengenai siapa sakit, siapa kriminal, siapa sehat dan siapa gila ditentukan dalam wacana itu. Bahkan mereka yang berwenang menentukan makna wacana, penguasa, menentukan pula apa itu kebenaran dan kontrol atas subjektivitas diri manusia. Dalam bingkai pikiran inilah wacana egaliter hanya terjadi ketika relasi kuasa sederajat dalam bersama-sama memaknai dan berposisi egaliter untuk melakukan diskursus tersebut.

Apa konsekuensinya bagi perumusan diri manusia? Apa pula dampak relasional dengan “the other” atau yang lain? Pertama, upaya-upaya kultural untuk merumuskan identitas diri manusia dan hubungannya dengan sesamanya harus ditaruh proyek dinamika kerjanya pada lintas disiplin ilmu. Tanpa itu diri akan atau diobjekkan atau direduksi menjadi ‘yang lain’ yang dijadikan objek. Semisal proyek kultural keIndonesiaan dari jati diri warga-warganya yang majemuk kultur maka keIndonesiaan harus ditafsir antar teks dengan meneliti, mendalami antar tekstual kebhinekaan yang saling memperkaya. Setiap politik penyeragaman hanya akan mematikan keIndonesiaan dalam pembekuan teks yang sekarat dan layu.

Kedua, perumusan diri manusia dalam harkatnya harus amat disadari selalu sudah dijebak dan dikonstruksi oleh adu kalah menang bentukan konstruksi kekuasaan (politik). Dan pada saat yang sama diri manusia dan sesamanya dalam konstruksi misalnya hidup bersama dalam bernegara akan ditentukan pembentukannya oleh konstruksi-konstruksi ekonomi, kapital. Ketidakmampuan menciptakan egalitarianisme dalam keadilan ekonomis maupun keadilan politis yaitu demokratisasi akan membuat siapa kuat ekonomis dan politis akan menindas yang kalah ekonomis dan politis.

Konsekuensi yang ketiga, setiap ikhtiar merumuskan siapa manusia dan sesamanya mesti menjadi proyek kultural seluruh teks dan antar teks yang berarti misalnya, seni, harus ditafsir dinamikanya bukan dari konsepsi rasionalnya tetapi dari praxis perayaan dan penghayatannya untuk dan dalam memuliakan si manusia, lingkungan dan sesamanya manusia.

Akankah keIndonesiaan yang sedang krisis kebanggaan ini harus dicari solusinya dengan menafsirkan kultural antar teks? Bisakah proses ini dirajut bila kemauan kita untuk mempercayai perlunya kita berubah menjadi lebih baik, lebih beradab masih terkeping-keping oleh “distrust”?

Bahasa, dalam konteks ini, ditesiskan bisa menjadi piranti penindasan, tetapi bisa pula

MENJADI INDONESIA DENGAN BUDAYA (BAHASA) SENDIRI

Written by Mudjia Rahardjo

Saturday, 27 February 2010 00:02 -

dikembangkan menjadi piranti pembebasan. Di kalangan peminat kajian wacana (*discourse analysis*) seperti van Dijk, upaya ini dibingkai dalam istilah khusus Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*).

Bahan Renungan Bersama dalam Seminar Nasional dan Monolog dengan tema Menjadi Indonesia dengan Budaya Sendiri, yang diprakarsai oleh BEM Fakultas Psikologi UIN Malang, tanggal 21 Maret 2007 dala rangka peringatan Dies Natalis Universitas Islam Negeri (UIN) Malang ke III